

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA  
JABATAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR  
119/Pdt.G/2013/PN.PTK)**

**TESIS**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA  
JABATAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR  
119/Pdt.G/2013/PN.PTK)**

Asfari Syukran An'umillah,1920122016, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 106  
halaman, 2023

**ABSTRAK**

Di dalam UUJN tidak terdapat pasal yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris. Hal ini dipertegas pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki secara materil (hal-hal) yang dikemukakan oleh para penghadap .permasalahan masalah diatas, Apa pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap protokol Notaris ?Bagaimana Tanggung Jawab Notaris yang telah pensiun terhadap protokolnya dikaitkan dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap protokol Notaris dan Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap protokolnya dikaitkan dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Bahan utama penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan undang-undang, literatur dan kajian hukum lain. Data primer dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan menyatakan para tergugat I,II,IV dan V telah melanggar hukum (Onrechtmatige daad) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (Onrechtmatige daad) Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan penjualan tanah yaitu HGB Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Protokolnya Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, bahwasanya Notaris Pemberi protokol (Tergugat III) Notaris dalam hal ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Notaris tersebut telah membuat surat kuasa sesuai dengan permintaan pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

*Kata Kunci:* Tanggung Jawab Notaris Berakhir Masa Jabatan Protokol

**NOTARY RESPONSIBILITIES AFTER THE END OF OFFICE TO THE  
NOTARY PROTOCOL (CASE STUDY OF PONTIANAK STATE COURT  
DECISION NUMBER 119/Pdt.G/2013/PN.PTK)**

Asfari Syukran An'umillah, 1920122016, Master of Notary Program, Andalas  
University, 106 pages, 2023

**ABSTRACT**

The Notary Protocol must be kept by the Notary for an unlimited period of time. Article 63 Paragraph (5) of the Notary Office Law states that the Notary's protocol from another Notary whose submission is 25 years old or more, is submitted to the Notary Regional Supervisory Council, but when there is a problem in the Notary's deed that the protocols provider is, the Notary's protocols provider is involved. perima protocols, problems with the problems above, What are the considerations of the judge in the decision on case number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk related to the Notary's Responsibilities after the end of the term of office for the Notary's protocol? 119/Pdt.G/2013/PN Ptk?, Research Objectives To find out the judge's considerations in the case decision number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk associated with Notary Responsibilities after the end of the term of office for Notary protocols and To find out responsibilities The notary who has retired according to the protocol is involved in case number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk. This study uses a normative juridical research approach. The main material for this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Primary data from primary, secondary and tertiary legal materials, using qualitative data analysis and presented in a descriptive form. The results of this study indicate that: The legal considerations of the judges at the Pontianak District Court in deciding to declare Defendants I, II, IV and V had violated the law (Onrechtmatige daad) and the applicable laws and regulations and were very contrary to the sense of justice and legal certainty. Breaking the law (Onrechtmatige daad) Unlawful acts committed by the defendant, namely selling land, namely HGB, declared illegal and null and void. Regarding the Responsibilities of Notaries who have Retired Against Their Protocols Associated in Case Number 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, whereas the Notary Giving the protocol (Defendant III) Notary in this case does not violate the applicable legal provisions, because the Notary has made a power of attorney in accordance with the request of the power of attorney to the power of attorney.

*Keywords: Notary's, Responsibilities, End of Term of Office ,And Notary Protocol*